KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIREKTORAT TATA NEGARA) (SUB DIREKTORAT PEWARGANEGARAAN)	Nomor SOP	AHU.UM.01.01 - 1137
	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum** Cahyo R. Muzhar NIP 196909181994031001
	Judul SOP	**SOP JAWABAN SURAT TELAAHAN/PENDAPAT HUKUM DI BIDANG PEWARGANEGARAAN**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;	1. Sarjana Hukum; 2. Sertifikasi….; 3. Pejabat Fungsional Analis Pertimbangan Hukum;
KETERKAITAN	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**
1. SOP JAWABAN SURAT TELAAHAN/PENDAPAT HUKUM DI BIDANG PEWARGANEGARAAN **2. SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH MEMPEROLEH REKOMENDASI BIN** **3. SOP PELAYANAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8** **4. SOP PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 YANG SUDAH PWRI** **5. SOP PELAYANAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN BAGI ORANG ASING YANG TELAH BERJASA KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN ALASAN KEPENTINGAN NEGARA** **6. SOP PELAYANAN PENYAMPAIAN SALINAN PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN (PASAL 20) KEPADA KANWIL** **7. SOP SALINAN SK PASAL 19** **8. SOP PENYAMPAIAN SK PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN (PASAL 19) KEPADA KANWIL** **9. SOP PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN (PASAL 19)**	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan

SOP Jawaban Surat Telaahan/Pendapat Hukum di Bidang Pewarganegaraan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Dir. Tata Negara	Kasubdit Pewarganegaraan	Kasi Penyelesaian Pewarganegaraan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	membaca, mempelajari dan mendisposisikan surat permintaan pendapat hukum di Bidang pewarganegaraan	MULAI				Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi	2 Hari	Disposisi	
2	meneliti, menelaah dan mendisposisikan surat permintaan pendapat hukum di bidang pewarganegaraan					Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi	1 Hari	Disposisi	
3	menerima disposisi dan mebuat konsep surat pendapat hukum di bidang pewarganrgaraan					Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi	1 Hari	Disposisi	
4	menganalisa, penyiapan data dukung dan menggetik konsep surat pendapat hukum di bidang pewargarganegaraan					Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi, nota dinas	2 Hari	Konsep Surat	
5	memeriksa dan mengoreksi konsep surat jawaban pendapat hukum dan daftar lampiran. Jika setuju memberi paraf dan menyerahkan Kepada Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan. Jika tidak setuju dikembalikan Kepada Penganalisis dan pertimbangan hukum dan Penganalisis pertimbangan hukum memeriksa kelengkapan data pendapat hukum dibidang pewarganegaraan		Y	T	T	Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi, nota dinas	1 Hari	Konsep Surat	
6	memeriksa dan mengoreksi konsep surat pendapat hukum di bidang pewarganegaraan Pewarganegaraan, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Tata Negara	Y		T		Surat jawaban permintaan pendapat hukum, lembar disposisi, nota dinas	1 Hari	Konsep Surat	
7	mengetahui dan menyetujui Surat jawaban permintaan pendapat hukum Pewarganegaraan, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	SELESAI				Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi, nota dinas dan surat jawaban pendapat hukum	1 Hari	Surat Jawaban Permintaan Pendapat Hukum di Bidang Pewarganegaraan	